

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui gambaran mengenai praktik pelaporan anti korupsi perusahaan BUMN yang terdaftar di BEI. Dengan menggunakan teori *coercive isomorphism*, penelitian ini berusaha untuk menjelaskan seberapa besar pengaruh variabel praktik *good corporate governance*, kepemilikan pemerintah, dan kekuatan dewan direksi terhadap pelaporan anti korupsi yang dilakukan oleh perusahaan BUMN yang terdaftar di BEI. Karakteristik spesifik perusahaan yang diperiksa adalah praktik GCG, kepemilikan pemerintah, dan kekuatan dewan direksi. Variabel kontrol yang digunakan dalam penelitian ini meliputi, tipe industri, kinerja keuangan, dan ukuran perusahaan.

Objek penelitian ini adalah 80 laporan tahunan perusahaan BUMN yang terdaftar di BEI tahun 2014-2017 serta laporan sustainability report bagi perusahaan yang mengeluarkannya pada tahun tersebut. Pelaporan anti korupsi kemudian dianalisis menggunakan *checklist* yang ada dalam *guideline* Global Reporting Index (GRI) versi G4 pada komponen anti korupsi. *Content analysis* digunakan dalam penelitian ini untuk memeriksa tingkat pelaporan anti korupsi dan uji asumsi klasik untuk menguji hipotesis. Tabel 5.1 menunjukkan ringkasan dari hasil penelitian.

Tabel 5.1 Ringkasan Hasil Penelitian

Pertanyaan Penelitian	Jawaban
1) Apakah praktik <i>good corporate governance</i> berpengaruh terhadap tingkat pelaporan anti korupsi perusahaan BUMN?	Ya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada hubungan antara praktik <i>good corporate governance</i> dengan pelaporan anti korupsi.
2) Apakah tingkat kepemilikan pemerintah berpengaruh terhadap tingkat pelaporan anti korupsi perusahaan BUMN?	Ya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada hubungan antara kepemilikan pemerintah dengan pelaporan anti korupsi.
3) Apakah kekuatan dewan direksi berpengaruh terhadap tingkat pelaporan anti korupsi perusahaan BUMN?	Tidak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak ada hubungan antara kekuatan dewan direksi dengan pelaporan anti korupsi.

Dari hasil hipotesis tersebut dapat dikatakan bahwa teori *coercive isomorphism* secara parsial dapat menjelaskan hubungan variabel dependen pelaporan anti korupsi dengan variabel independen dan variabel kontrol dalam penelitian ini.

Penelitian ini menunjukkan bahwa dari 20 sampel perusahaan yang diteliti, mayoritas perusahaan sampel mengungkapkan item pengungkapan anti korupsi GRI pada poin G4-SO4. Alasan yang mungkin bisa diberikan mengapa mayoritas perusahaan mengungkapkan item G4-SO4 dibanding G4-SO3 dan G4-SO5 adalah G4-SO4 bisa menjadi pedoman untuk melakukan sistem pengendalian internal yang kuat, G4-SO4 dianggap dapat memberikan nilai tambah perusahaan di mata stakeholder.

Hanya dua variabel independen, yaitu praktik *good corporate governance* (GCG) dan tingkat kepemilikan pemerintah yang menunjukkan adanya hubungan

dengan pelaporan anti korupsi, sedangkan variabel independen kekuatan dewan direksi dan variabel kontrol kinerja keuangan, tipe industri, dan ukuran perusahaan tidak mempunyai hubungan dengan pelaporan anti korupsi.

5.2 Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini tidak terlepas dari keterbatasan-keterbatasan yang memerlukan perbaikan dan pengembangan untuk penelitian selanjutnya. Keterbatasan penelitian tersebut adalah:

1. Peneliti menggunakan GRI G4 untuk acuan dalam pengambilan data variabel dependen, bukan Standar GRI, versi terbaru acuan GRI, yang dirilis pada pertengahan tahun 2016. Hal ini disebabkan karena penerapan Standar GRI secara efektif baru diberlakukan pada pertengahan tahun 2018.
2. Sampel yang digunakan didalam penelitian ini hanya menggunakan BUMN yang terdaftar di BEI. Hal ini dikarenakan Peneliti ingin mengetahui pertanggung jawaban perusahaan tidak hanya terhadap Pemerintah tetapi juga kepada stakeholder lain, seperti pemegang saham.

5.3 Saran

1. Penelitian selanjutnya diharapkan menggunakan GRI yang terbaru yaitu Standar GRI dalam pengambilan data variabel dependen, agar bisa dijadikan pembanding dengan penelitian ini yang menggunakan GRI G4.
2. Sampel yang pada penelitian selanjutnya baiknya tidak hanya memakai BUMN yang terdaftar di BEI, tetapi semua BUMN yang ada, agar mendapat gambaran yang lengkap mengenai bagaimana pelaporann anti korupsi pada BUMN.

5.4 Implikasi

1. Bagi Perusahaan

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik *good corporate goveranance* berpengaruh positif dan signifikan terhadap pelaporan anti korupsi. Berdasarkan hasil tersebut, perusahaan diharapkan dapat memperhatikan praktik *good corporate goveranance* yang dapat mempengaruhi adanya upaya pelaporan anti korupsi oleh pihak manajer perusahaan.

2. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat kepemilikan pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pelaporan anti korupsi.

Berdasarkan hasil tersebut, pemerintah diharapkan dapat menekan perusahaan untuk melaporkan pelaporan anti korupsi, baik melalui regulasi maupun melalui rapat umum pemegang saham dalam BUMN yang terdaftar di BEI.